

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH TAHUN 2020 DAN 2021**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALBERT HONGGARA**

**1901036173**

**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

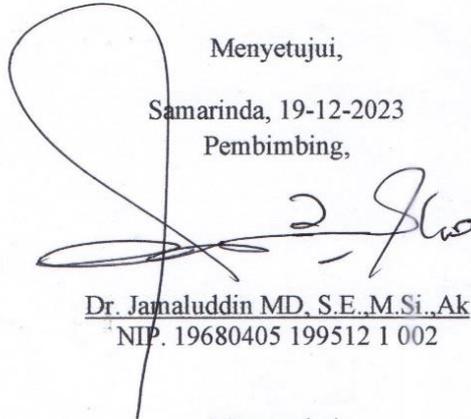
Judul Penelitian : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  
di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021  
Nama Mahasiswa : Albert Honggara  
NIM : 1901036173  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1 – Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 19-12-2023

Pembimbing,



Dr. Jamaluddin MD, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 19680405 199512 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620512 198811 2 001

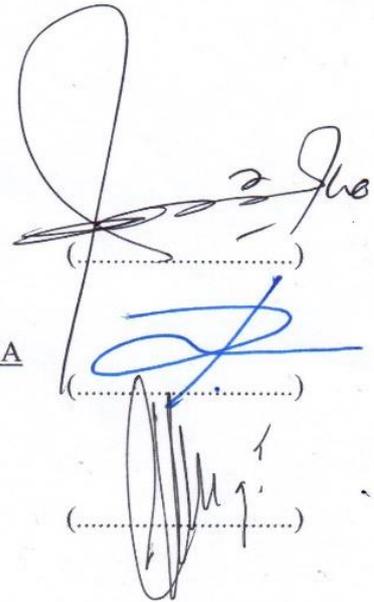
Lulus Tanggal Ujian : 16 November 2023

**SKRIPSI INI TELAH DI UJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021  
Nama : Albert Honggara  
NIM : 1901036173  
Hari : Kamis  
Tanggal Ujian : 16 November 2023

**TIM PENGUJI**

1. Dr. Jamaluddin MD, S.E.,M.Si.,Ak  
NIP. 19680405 199512 1 002
2. Dr. Wulan Iyhyig Ratna Sari, S.E.,M.Si.,CSP.,CMA.,CPS.,CIBA  
NIP. 19770328 200312 2 001
3. Agus Iwan Kesuma, S.E.,M.A  
NIP. 19750802 199903 1 001



(.....)

(.....)

(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 23 Oktober 2023



Albert Honggara

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,  
saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Albert Honggara  
NIM : 1901036173  
Program Studi : S1 - Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan  
ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti  
Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas Skripsi saya yang berjudul  
**“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  
di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah”** beserta perangkat yang  
ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non Eksklusif ini kepada UPT.  
Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau  
memformatkan, mengelola dalam bentuk perangkat data (database), merawat dan  
mempublikasi Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai  
penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 22, Desember 2023  
Yang menyatakan,



**Albert Honggara  
1901036173**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah. Kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan adalah *Statistical Program for Social Science* (SPSS). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dan 2021. Data realisasi APBD diperoleh melalui *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Data IPM diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kata Kunci:** Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, kesejahteraan masyarakat

## **ABSTRACT**

This research aims to determine the influence of regional financial performance on community welfare in districts/cities in Central Kalimantan Province. Regional financial performance is measured by the regional financial independence ratio and the effectiveness ratio of Regional Original Income, while community welfare is measured by the Human Development Index (HDI). This research was conducted in 14 districts/cities in Central Kalimantan Province. The research method used in this research is multiple linear regression. The analytical tool used is the Statistical Program for Social Science. The type of data used in this research is secondary data. The data used in this research is the realization of regional income and expenditure budgets from 2020-2021. Realization of regional income and expenditure budgets is obtained through the website of the Directorate General of Regional Financial Balance. HDI data is obtained through the Central Statistics Agency website. The results of this research show that the regional financial independence ratio has a partial effect on community welfare, while the regional original income effectiveness ratio has no partial effect on community welfare in all regencies/cities in Central Kalimantan Province.

**Keyword:** Regional financial performance, regional financial independence ratio, effectiveness ratio of regional original income, community welfare

## RIWAYAT HIDUP



Albert Honggara lahir pada tanggal 25 Juli 2002 di Sampit, merupakan putra kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Joli dan Ibu Tanti. Memulai pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Sampit dan lulus pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan lagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) St.

Albertus Sampit pada lulus 2016, serta melanjutkan jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Taruna Jaya sampit dan lulus pada tahun 2019.

Jenjang Perguruan Tinggi pada tahun 2019 di Universitas Mulawarman, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi. Dalam menempuh jenjang Perguruan Tinggi penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 48 di Kampung Cempedas, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022.

Samarinda 22 Desember 2023

Albert Honggara

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
4. Dr. H. Zaki Fahroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas dan Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
5. Dr. Jamaluddin, MD,S.E.,M.SI.,Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, arahan, dan motivasi tak terhingga selama proses pengerjaan skripsi berlangsung
6. Bapak Rusliansyah, S.E.,M.Si selaku Dosen Penasehat yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan
7. Segenap Bapak & Ibu Dosen Universitas Mulawarman yang telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan, beserta Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan selama perkuliahan

8. Orangtua dan paman terkasih yang telah bekerja keras dalam membesarkan dan memenuhi segala kebutuhan khususnya, kebutuhan pendidikan penulis hingga di tahap perguruan tinggi serta yang selalu menjaga nama penulis di setiap doa baiknya
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan dorongan positif selama proses berlangsung
10. Diri sendiri yang selalu optimis dan terus bergerak maju untuk menyelesaikan tahap ini
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis rincikan satu per satu, yang telah membantu dan menyemangati dalam proses skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak bahwa tidak yang sempurna dan masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan dan menerima secara terbuka apabila terdapat saran dan kritik pada pada skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Tuhan dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Samarinda, 16-11-2023

Albert Honggara

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Keagenan .....	7
2.1.2. Kinerja Keuangan Daerah.....	8
2.1.3. Kesejahteraan Masyarakat .....	10
2.2. Penelitian Terdahulu .....	11
2.3. Rerangka Konseptual .....	13
2.4. Pengembangan Hipotesis .....	14
2.4.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat .....	14
2.4.2. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. 15	
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>

3.1.	Definisi Operasional dan Pengukuran .....	17
3.1.1.	Kinerja Keuangan Daerah.....	17
3.1.2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD).....	17
3.1.3.	Rasio Efektivitas PAD .....	18
3.1.4.	Kesejahteraan Masyarakat .....	18
3.2.	Populasi dan Sampel .....	18
3.3.	Sumber Data.....	18
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	19
3.5.	Alat Analisis.....	19
3.5.1.	Statistik Deskriptif .....	19
3.5.2.	Analisis Rasio .....	19
3.5.3.	Uji Asumsi Klasik.....	20
3.5.4.	Uji Regresi Linier Berganda .....	21
3.5.5.	Uji Determinasi .....	22
3.5.6.	Uji Simultan (Uji F).....	22
3.5.7.	Uji Parsial (Uji t).....	22
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1.	Data Penelitian .....	23
4.1.1.	Realisasi APBD .....	23
4.2.	Analisis Data.....	25
4.2.1.	Analisis Rasio .....	25
4.2.2.	Statistik Deskriptif .....	29
4.2.3.	Uji Asumsi Klasik.....	30
4.2.4.	Uji Regresi Linier Berganda .....	32
4.2.5.	Uji Determinasi .....	33
4.2.6.	Uji Simultan (Uji F).....	33
4.2.7.	Uji Parsial (Uji t).....	34
4.3.	Pembahasan.....	34
4.3.1.	Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah .....	34
4.3.2.	Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah .....	36
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>39</b>

5.1. Kesimpulan .....	39
5.2. Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN 1.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN 3.....</b>	<b>426</b>
<b>LAMPIRAN 4.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia dan Target IPM .....	3
Tabel 2.1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	9
Tabel 2.2. Kriteria Efektivitas PAD .....	10
Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 4.1. Realisasi APBD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	23
Tabel 4.2. Realisasi APBD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....	24
Tabel 4.3. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021 .....	25
Tabel 4.4. RKKD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.....	25
Tabel 4.5. Tingkat Kemandirian Keuangan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021 .....	26
Tabel 4.6. Rasio Efektivitas PAD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021 .....	27
Tabel 4.7. Tingkat Efektivitas PAD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021 .....	28
Tabel 4.8. Hasil Statistik Deskriptif.....	29
Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas .....	30
Tabel 4.10. Hasil Uji Autokorelasi .....	30
Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinieritas .....	31
Tabel 4.12. Hasil Regresi Linier Berganda.....	32
Tabel 4.13. Hasil Uji Determinasi.....	33
Tabel 4.14. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	33
Tabel 4.15. Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	34

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Rerangka Konseptual .....	13
Gambar 2.2. Model Penelitian .....	16
Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedasitas.....	31

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
PAD	Pendapatan Asli Daerah
RKKD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
UU	Undang-Undang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Tengah .....	42
Lampiran 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .....	42
Lampiran 3. Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) .....	46
Lampiran 4. Peringkat IPM Provinsi Tahun 2020-2021 .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan undang-undang di atas, kepala daerah memiliki kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena kepala daerah merupakan penyelenggara pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Manusia bisa menjadi indikator dari kesejahteraan masyarakat (Evlyn & Rahayu, 2018).

IPM dapat menjelaskan cara masyarakat untuk memperoleh banyak hal seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan dengan mengandalkan hasil pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan hal tersebut IPM dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan masyarakat dapat tercapai dengan mengandalkan hasil pembangunan. Menurut Dura (2016) kebutuhan yang dipenuhi agar masyarakat sejahtera adalah kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah, dan kualitas kesehatan.

IPM dibentuk berdasarkan tiga hal yaitu umur panjang (diukur dengan umur harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto). Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menggambarkan pendapatan masyarakat. Pada tingkat yang lebih kecil PNB digantikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita juga mampu menggambarkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2022)

Kinerja keuangan yang bagus diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kinerja yang bagus menandakan bahwa daerah mampu untuk mendukung pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kunci kesejahteraan masyarakat (Zakni, 2020).

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola PAD serta mendapatkannya. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, dan berjalannya sistem pemerintahan (Halim, 2012). Pemerintah daerah bertanggungjawab atas keuangan yang dikelolanya kepada masyarakat. Pemerintah daerah membuat APBD sebagai wujud pertanggungjawabannya. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Ada dua rasio yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, yaitu kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD

Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan gambaran seberapa mandiri daerah dengan keuangannya sendiri. Jika rasio ini tinggi maka daerah

mampu menggali PAD dengan baik (Mahmudi, 2016). Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah dapat lebih mendukung pelayanan publik dengan dana yang lebih banyak sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran semampu apa daerah dapat mencapai target anggaran PAD (Mahmudi, 2016). Pemerintah daerah membuat program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program-program ini tercermin dalam APBD (Mardiasmo, 2021). Semakin tinggi efektivitas PAD maka semakin banyak dana yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Target IPM**

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		Target Indeks Pembangunan Manusia	
		2020	2021	2020	2021
1.	Palangkaraya	80.77	80.82	79.90	80.00
2.	Kotawaringin Timur	71.31	71.38	69.76	69.94
3.	Kotawaringin Barat	72.87	73.07	72.93	73.38
4.	Barito Timur	71.39	71.47	72.07	72.53
5.	Barito Utara	70.59	70.79	71.02	71.65
6.	Barito Selatan	70.22	70.54	71.33	72.22
7.	Seruyan	67.58	67.67	68.50	69.30
8.	Sukamara	68.03	68.27	68.03	68.62
9.	Pulang Pisau	68.45	68.53	68.71	69.14*
10.	Katingan	68.68	68.89	69.14	69.67
11.	Kapuas	69.48	69.63	71.72	73.26
12.	Gunung Mas	70.81	71.03	71.82	72.46
13.	Lamandau	70.51	70.58	70.77	71.20
14.	Murung Raya	67.98	68.12	68.58	69.05

Sumber : BPS, RPJMD, RKPD

Keterangan : (\*) Taksiran

Setiap pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah membuat rencana pembangunan untuk mencapai tujuannya. Salah satu tujuan yang terdapat dalam rencana pembangunan tersebut adalah meningkatkan IPM sesuai dengan yang telah

ditergetkan. Tabel di atas menunjukkan masih ada beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mencapai target IPM. Selain itu, pencapaian IPM di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari status IPM masing-masing daerah. Status IPM Palangkaraya satu-satunya yang berstatus sangat tinggi, 7 daerah berstatus tinggi, dan 6 daerah berstatus sedang.

Berdasarkan data dari BPS, peringkat pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari peringkat 20 menjadi peringkat 21. Hal ini menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peringkat ketiga dari lima provinsi di Pulau Kalimantan. Selama tahun 2020 – 2021, Kota Palangkaraya mencapai IPM tertinggi di wilayah Pulau Kalimantan (Kalteng.co, 2022). Justru peringkat pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah menurun. Hal ini disebabkan karena pencapaian IPM di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari status IPM masing-masing daerah. Status IPM Palangkaraya satu-satunya yang berstatus sangat tinggi, 7 daerah berstatus tinggi, dan 6 daerah berstatus sedang.

Studi Cahyaning & Putri (2022) menunjukkan rasio efektivitas PAD mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Selain itu penelitian oleh Karimah et al (2020) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap IPM. Namun penelitian Astuti & Mispriyanti (2019) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap IPM yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan hasil penelitian di atas membuat peneliti untuk mengkaji kembali pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

penelitian ini dilakukan dilokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti melakukan penelitian pada Provinsi Kalimantan Tengah karena hanya provinsi ini yang mengalami penurunan peringkat IPM di Pulau Kalimantan. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran 4

Hal yang diuraikan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

1. Apakah rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap kesejahteraan masyarakat

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah mengenai bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Penelitian ini dilakukan dengan dasar teori keagenan. Hubungan keagenan pada pemerintah daerah terdapat pada pemilih (masyarakat) dan yang dipilih (kepala daerah). Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi hubungan tersebut sehingga pemerintah harus mensejahterakan masyarakat. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut.

##### **2.1.1. Teori Keagenan**

Teori ini menjelaskan hubungan yang timbul karena suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak. Hubungan tersebut adalah individu atau lebih (*principal*) mempekerjakan pihak pihak lain (*agent*). Hubungan tersebut terjadi melalui pendelegasian wewenang (Meckling, 1976). Teori keagenan dapat diterapkan di sektor publik. *Principal* dalam sektor publik adalah masyarakat sedangkan *agent* adalah pemerintah (Bergman & Lane, 1990). Teori keagenan ini menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah sebagai agen tidak boleh bertentangan dengan keinginan atau kepentingan masyarakat sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan antara dua pihak tersebut memunculkan sebuah konsekuensi. Konsekuensi tersebut adalah akuntabilitas (Kholmi, 2017).

Pemerintah memegang uang publik sehingga untuk tersebut bukan untuk diri sendiri. Pada masyarakat demokratis, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah. Hal tersebut dilakukan melalui pemilihan umum. Politisi membuat kebijakan publik dan program agar dapat memberikan manfaat kepada pemilihnya.

Kebijakan publik dan program tersebut direfleksikan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2021).

Akuntabilitas adalah kewajiban *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *principal*. Selain itu, *agent* juga memiliki kewajiban untuk melaporkan serta melaporkan semua aktivitas yang berhubungan dengan tanggung jawabnya (Mardiasmo, 2021).

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini karena adanya akuntabilitas yang muncul akibat hubungan yang telah terjalin antara *principal* dan *agent*. Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas. Selain itu, *agent* harus mengutamakan kepentingan *principal* yaitu kesejahteraannya. Pengukuran kinerja diperlukan karena munculnya akuntabilitas akibat hubungan tersebut. Kinerja yang diukur tersebut merupakan gambaran pencapaian yang diperoleh pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mewujudkan kepentingan masyarakat (*principal*) yaitu kesejahteraannya. Keberhasilan *agent* dalam mewujudkan kesejahteraan *principal* dalam penelitian ini diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD.

Berdasarkan uraian di atas, teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

### **2.1.2. Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola PAD serta mendapatkannya. Pemerintah melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan. Pemerintah

juga melakukan hal tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Semua hal tersebut dilakukan tanpa terlalu mengandalkan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi lebih luasa dalam menggunakan keuangannya untuk kepentingan masyarakat. Keleluasaan tersebut masih dilakukan dalam batas undang-undang (Syamsi, 1986).

Kinerja adalah suatu pencapaian kerja. Pencapaian tersebut diukur secara kuantitas maupun kualitas. Pencapaian tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun organisasi tertentu dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan tanggungjawabnya (Nurulita et al., 2018). Pengelolaan keuangan daerah harus dipertanggungjawabkan sehingga penting dilakukannya pengukuran kinerja keuangan. (Oktaviani et al., 2022). Kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio di bawah ini.

#### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

RKKD ini memberikan gambaran seberapa tergantungnya pemerintah daerah terhadap dana dari luar. RKKD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tidak terlalu mengandalkan dana dari luar. RKKD juga dapat menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat adalah dalam hal membayar pajak dan retribusi (Halim, 2012).

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

**Tabel 2.1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2012)

## 2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran seberapa mampu suatu daerah dalam mencapai target anggaran PAD. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

**Tabel 2.2. Kriteria Efektivitas PAD**

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

*Sumber:* Mahmudi (2016)

### 2.1.3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat manusia mampu memenuhi untuk memenuhi kebutuhan material, mendapatkan kehormatan, dan mencapai kebebasan memilih (Todaro, 2010). Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia ditujukan bagi penduduk agar memiliki pilihan yang luas melalui pemberdayaan masyarakat (UNDP, 1990).

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat kebutuhan seperti kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah dan kualitas kesehatan dapat terpenuhi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga merupakan suatu kondisi pemaksimalan utilitas dengan keterbatasan anggaran dan tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura, 2016)

Kesimpulan dari penjelasan di atas, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi saat manusia mampu memenuhi kebutuhan material seperti rumah yang layak, biaya pendidikan yang murah mendapatkan kehormatan, mencapai kebebasan memilih, tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani serta mampu memaksimalkan utilitasnya.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Studi oleh Cahyaning & Putri (2022) dengan judul “Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Studi oleh Khairudin et al., (2020) dengan judul “Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia” menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan, dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Studi oleh Karimah et al., (2020) dengan judul “*Analysis of Regional Government Financial Performance and Impact on Welfare Society*” menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan efektivitas PAD, pertumbuhan PAD, dan kesesuaian belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

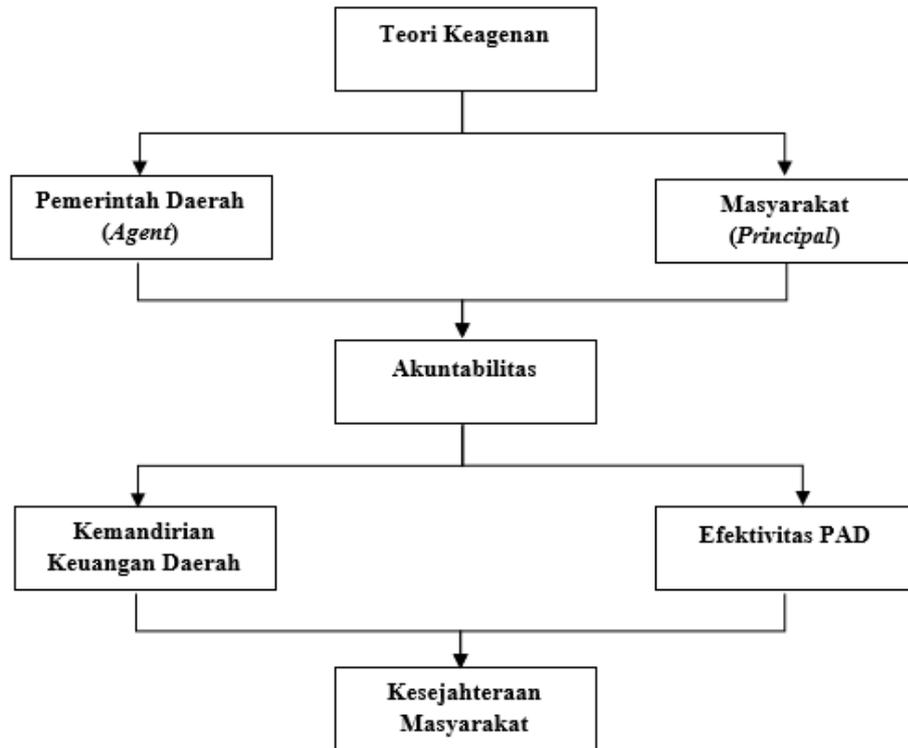
Studi oleh Hamimah & Zulkarnain (2020) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat” menunjukkan bahwa Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM.

**Tabel 2.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Keterangan	
1	<b>Nama Peneliti</b>	Cahyaning & Putri (2022)
	<b>Judul Penelitian</b>	“Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”
	<b>Variabel Independen</b> <b>Variabel Dependen</b>	Rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Kesejahteraan masyarakat
	<b>Hasil Penelitian</b>	Semua variabel independen berperpengaruh terhadap kesesjahteraan masyarakat
2	<b>Nama Peneliti</b>	Khairudin, Aminah & Redaputri (2020)
	<b>Judul Penelitian</b>	“Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”
	<b>Variabel Independen</b> <b>Variabel Dependen</b>	Kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan, efisiensi keuangan, dan pertumbuhan keuangan Kesejahteraan masyarakat
	<b>Hasil Penelitian</b>	Variabel yang berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat hanya variabel pertumbuhan keuangan sedangkan variabel lain memiliki pengaruh positif
3	<b>Nama Peneliti</b>	Karimah, Sarwani & Adriani (2020)
	<b>Judul Penelitian</b>	<i>“Analysis of Regional Government Financial Performance and Impact on Welfare Society”</i>
	<b>Variabel Independen</b> <b>Variabel Dependen</b>	Desentralisasi fiskal, efisiensi keuangan daerah, pengeluaran pemerintah, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, pertumbuhan PAD, dan kesesuaian belanja daerah Kesejahteraan masyarakat
	<b>Hasil Penelitian</b>	Variabel yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat hanya kemandirian keuangan daerah sedangkan variabel yang lain tidak memberikan pengaruh
4	<b>Nama Peneliti</b>	Hamimah & Zulkarnain (2020)
	<b>Judul Penelitian</b>	“Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat”
	<b>Variabel Independen</b> <b>Variabel Dependen</b>	Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio belanja modal IPM
	<b>Hasil Penelitian</b>	Variabel yang tidak berpengaruh terhadap IPM hanya rasio belanja sedangkan variabel yang lain memberikan pengaruh

Sumber: data olahan

### 2.3. Rerangka Konseptual



**Gambar 2.1. Rerangka Konseptual**

Pemerintah daerah menerima mandat dari masyarakat untuk mengelola keuangannya sehingga akuntabilitas muncul akibat hubungan tersebut. Pelaksanaan mandat tersebut direfleksikan dalam APBD. Pengukuran kinerja keuangan daerah diperlukan untuk menilai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD. Semakin baik kinerja keuangan daerah yang diukur melalui dua rasio tersebut maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan terdukungnya dana yang cukup untuk menjalankan APBD

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pemerintah daerah (*agent*) diharapkan mampu mengelola keuangan daerah melalui APBD secara bertanggungjawab kepada masyarakat sehingga uang publik yang dikelola dapat bermanfaat bagi masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah perlu menggali PAD dengan baik. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga sistem pemerintah dapat berjalan sistem pemerintahan. Pemerintah juga melakukan hal tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Semua hal tersebut dilakukan tanpa terlalu mengandalkan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi lebih luasa dalam menggunakan keuangannya untuk kepentingan masyarakat

Kemampuan daerah dalam menggali PAD agar tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat dapat diukur menggunakan RKKD. Semakin tinggi RKKD maka semakin tinggi juga PAD yang berarti pemerintah mampu untuk menggali sumber keuangan asli daerahnya untuk mendukung berjalannya pemerintahan untuk mencapai tujuannya melalui APBD yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD yang tinggi atau RKKD yang tinggi menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. RKKD yang tinggi juga menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan dari luar yang rendah. Semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan dari luar maka makin banyak dana yang bisa digunakan untuk melaksanakan program-program yang telah dianggarkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Penelitian terdahulu Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

**H<sub>1</sub>: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

#### **2.4.2. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

APBD dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena dalam APBD terdapat rencana-rencana pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah melalui pemelihan umum. APBD diperlukan untuk memberikan manfaat kepada pemilih yang merefleksikan bentuk kebijakan publik dan program yang dibuat oleh politisi dengan mentranslasikan mandat yang diberikan masyarakat sebagai pemilih.

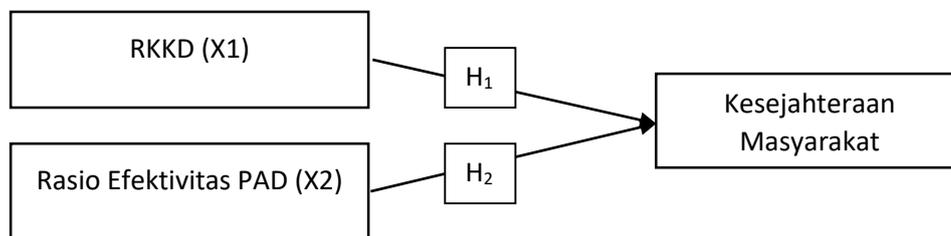
Pemerintah yang diberikan mandat oleh masyarakat melalui pemilihan umum memberikan pertanggungjawaban kepada pemilih. Pertanggungjawaban pemerintah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas. Selain itu, pemerintah daerah memerlukan dana untuk melaksanakan APBD sehingga kemampuan untuk menggali PAD sesuai dengan target yang telah ditentukan penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat diukur dengan rasio efektivitas PAD.

Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD semakin baik. Kemampuan perealisasi PAD yang

baik dapat membantu pelaksanaan APBD agar program-program yang telah direncanakan dapat dijalankan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

Penelitian terdahulu Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020); Hamimah & Zulkarnain (2020) menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

**H<sub>2</sub>: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat**



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

Keterangan:

RKKD adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu lalu dianalisa secara statistika

#### **2.1. Definisi Operasional dan Pengukuran**

Definsi operasional adalah hal yang diamati. Hal tersebut dapat didefinisikan dengan kata-kata. Kata-kata tersebut harus mendeskripsikan hal tersebut (H. Ghodang & Hantono, 2020). Pengukuran yang dipakai untuk meneliti adalah skala rasio

##### **2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menggali sumber keuangannya yaitu PAD untuk membiayai pelaksanaan APBD sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada halangan dana yang tidak tercukupi pada tahun 2020 dan 2021. Kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio di bawah ini.

##### **2.1.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)**

RKKD ini menggambarkan ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sumber dana luar pada tahun 2020 dan 2021. Semakin tinggi RKKD maka tingkat ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sumber dana dari luar semakin rendah.

$$RKKD = \frac{PAD}{Bantuan\ Pusat\ dan\ Pinjaman} \times 1$$

### 2.1.3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran tentang kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target PAD pada tahun 2020 dan 2021. Semakin tinggi rasio ini maka kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target PAD pada tahun 2020 dan 2021 semakin tinggi.

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

### 2.1.4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah mampu memenuhi kebutuhannya seperti kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah dan kualitas kesehatan.

## 2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sampel dalam penelitian ini.

## 2.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data diperoleh masing-masing melalui *website* DJPK dan BPS. Data yang diambil adalah IPM dan Realisasi APBD dari tahun 2020-2021. Data tersebut berjenis kuantitatif.

## 2.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi data Realisasi APBD dan IPM di setiap kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020-2021. Realisasi APBD diambil dari *website* DJPK dengan alamat “<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>”. IPM diambil dari *website* BPS Kalimantan Tengah dengan alamat “<https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>”.

## 2.5. Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan SPSS untuk melakukan regresi linier berganda terhadap data yang akan dianalisis. Analisis rasio dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan regresi linier berganda.

### 2.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah model data yang diolah untuk menggambarkan berbagai ciri-ciri data. Ciri-ciri data tersebut seperti rata-rata, nilai tengah, modus, kuartil, varian, standar deviasi, nilai terendah dan tertinggi, serta grafik (Sujarweni & Utami, 2020)

### 2.5.2. Analisis Rasio

#### 1. RKKD

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

## 2. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### 2.5.3. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk mengetahui normal tidaknya data dari populasi. Uji ini dilakukan dengan cara mengukur data yang mempunyai skala ordinal, interval serta rasio. Metode parametrik dapat digunakan apabila data berdistribusi normal. (H. Ghodang & Hantono, 2020). Data dapat dikatakan normal apabila nilai sig lebih dari 0,05, jika tidak melebihi maka data tidak normal (Sujarweni & Utami, 2020).

#### 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya (Sujarweni & Utami, 2020). Kriteria ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut (H. Ghodang & Hantono, 2020).

- a. Autokorelasi dapat diketahui dari nilai *durbin Watson*  $< dL$  atau  $> 4 - dL$  Jika *durbin watson*  $<$  dari  $dL$  atau  $>$  dari  $4 - dL$
- b. Keputusan tidak terdapatnya autokorelasi dapat diketahui dari nilai *durbin watson* yang terletak antara  $dU$  dan  $4 - dU$

#### 3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan agar diketahui ada kemiripan atau tidak dari variabel-variabel independen dalam suatu model. Jika ada

kemiripan maka akan terjadi autokorelasi. Uji ini juga dapat digunakan dalam penghindaran kebiasaan pada pengambilan keputusan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Syarat tidak terjadinya multikolinieritas apabila VIF di antara satu sampai sepuluh (Sujarweni & Utami, 2020).

#### 4. Uji Heterokedasitas

Heterokedasitas merupakan pengujian apakah ada perbedaan varian sisa “residual” dari pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Pengamatan tersebut dalam satu periode . Penelitian ini menggunakan gambar scatterplot untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Kriteria regresi yang tidak terjadi heteroskedasitas jika titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola (Sujarweni & Utami, 2020).

#### 2.5.4. Uji Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda memberikan penjelasan tentang hubungan fungsional antara variabel independen dan dependen. Variabel independen tersebut lebih dari satu sedangkan dependen hanya satu. Penyelesaian model ini menggunakan *Ordinary Least Square Estimate* (Gani & Amalia, 2014). Model yang dibentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y adalah Kesejahteraan Masyarakat

X<sub>1</sub> adalah Kemandirian Keuangan Daerah

X<sub>2</sub> adalah Efektivitas PAD

α adalah Konstanta

β adalah Koefisien Regresi

$\varepsilon$  adalah *Error Term*

### **2.5.5. Uji Determinasi**

Uji determinasi adalah sebuah angka yang menyatakan berbagai perubahan nilai variabel dependen. Variabel dependen tersebut ditentukan oleh berbagai perubahan semua variabel independen. Angka tersebut dalam bentuk persentase (Gani & Amalia, 2014).

### **2.5.6. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dipakai agar dapat diketahui nilai signifikansi dari model regresi berganda yang dapat ditentukan dari dua keputusan di bawah (H. Ghodang & Hantono, 2020), yaitu:

1. Hipotesis dapat dikatakan terbukti apabila nilai sig kurang dari 0.05, jika lebih berarti tidak terbukti
2. Hipotesis dapat dikatakan terbukti apabila nilai  $f_{hitung}$  lebih besar dari  $f_{tabel}$ , jika lebih kecil maka tidak terbukti

### **2.5.7. Uji Parsial (Uji t)**

Uji t dipakai agar diketahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara dibawah (H. Ghodang & Hantono, 2020).

1. Hipotesis dapat dikatakan terbukti apabila nilai sig kurang dari 0.05, jika lebih berarti tidak terbukti
2. Hipotesis dapat dikatakan terbukti apabila nilai  $f_{hitung}$  lebih besar dari  $f_{tabel}$ , jika lebih kecil maka tidak terbukti

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Data Penelitian

Data di bawah merupakan data yang akan digunakan dalam analisis

##### 4.1.1. Realisasi APBD

**Tabel 4.1. Realisasi APBD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020 (dalam miliar)		
		Anggaran PAD	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah
1.	Palangkaraya	173.01	180.18	1,136.83
2.	Kotawaringin Timur	270.00	232.89	1,617.04
3.	Kotawaringin Barat	255.06	224.65	1,449.01
4.	Barito Timur	88.44	61.66	875.04
5.	Barito Utara	121.27	75.96	1,141.78
6.	Barito Selatan	93.78	56.79	987.38
7.	Seruyan	266.92	70.36	1,012.12
8.	Sukamara	45.01	41.00	646.83
9.	Pulang Pisau	48.85	42.51	924.21
10.	Katingan	62.57	60.60	1,145.92
11.	Kapuas	128.78	131.36	1,755.99
12.	Gunung Mas	60.32	66.06	990.64
13.	Lamandau	50.72	53.04	834.60
14.	Murung Raya	70.93	77.50	1,195.59

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

**Tabel 4.2. Realisasi APBD Tahun 2021 di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2021 (dalam miliar)		
		Anggaran PAD	Realisasi PAD	Realisasi Pendapatan Daerah
1.	Palangkaraya	167.97	289.40	1,258.73
2.	Kotawaringin Timur	276.73	327.43	1,878.72
3.	Kotawaringin Barat	270.42	392.16	1,633.97
4.	Barito Timur	109.68	98.46	962.03
5.	Barito Utara	92.99	104.05	1,233.74
6.	Barito Selatan	95.78	97.74	999.99
7.	Seruyan	137.47	83.04	1,113.15
8.	Sukamara	42.40	55.78	664.77
9.	Pulang Pisau	46.39	125.32	1,023.14
10.	Katingan	80.00	67.04	1,224.87
11.	Kapuas	104.13	148.61	1,837.12
12.	Gunung Mas	64.02	85.11	1,078.82
13.	Lamandau	51.29	95.06	906.31
14.	Murung Raya	73.63	111.03	1,303.99

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Data di atas merupakan data yang yang dibutuhkan untuk melakukan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD. Anggaran PAD dan realisasi pendapatan transfer digunakan untuk analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Anggaran PAD dan realisasi PAD digunakan untuk analisis efektivitas PAD.

Data pada 2 tabel di atas bukan merupakan keseluruhan dari isi laporan Realisasi APBD tapi hanya data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis rasio.

**Tabel 4.3. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia	
		2020	2021
1.	Palangkaraya	80.77	80.82
2.	Kotawaringin Timur	71.31	71.38
3.	Kotawaringin Barat	72.87	73.07
4.	Barito Timur	71.39	71.47
5.	Barito Utara	70.59	70.79
6.	Barito Selatan	70.22	70.54
7.	Seruyan	67.58	67.67
8.	Sukamara	68.03	68.27
9.	Pulang Pisau	68.45	68.53
10.	Katingan	68.68	68.89
11.	Kapuas	69.48	69.63
12.	Gunung Mas	70.81	71.03
13.	Lamandau	70.51	70.58
14.	Murung Raya	67.98	68.12

Sumber: Badan Pusat Statistik

## 4.2. Analisis Data

Penganalisisan data dilakukan dengan langkah-langkah dibawah ini.

### 4.2.1. Analisis Rasio

**Tabel 4.4. RKKD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Realisasi PAD	Realisasi Pendapat- an Daerah	RKKD	Realisasi PAD	Realisasi Pendapat- an Daerah	RKKD
1.	Palangkaraya	180.18	1,136.83	15.85%	289.40	1,258.73	22.99%
2.	Kotawaringin Timur	232.89	1,617.04	14.40%	327.43	1,878.72	17.43%
3.	Kotawaringin Barat	224.65	1,449.01	15.50%	392.16	1,633.97	24.00%
4.	Barito Timur	61.66	875.04	7.05%	98.46	962.03	10.23%
5.	Barito Utara	75.96	1,141.78	6.65%	104.05	1,233.74	8.43%

**Tabel 4.4. Sambungan**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Realisasi PAD	Realisasi Pendapat- an Daerah	RKKD	Realisasi PAD	Realisasi Pendapat- an Daerah	RKKD
6.	Barito Selatan	56.79	987.38	5.75%	97.74	999.99	9.77%
7.	Seruyan	70.36	1,012.12	6.95%	83.04	1,113.15	7.46%
8.	Sukamara	41.00	646.83	6.34%	55.78	664.77	8.39%
9.	Pulang Pisau	42.51	924.21	4.60%	125.32	1,023.14	12.25%
10.	Katingan	60.60	1,145.92	5.29%	67.04	1,224.87	5.47%
11.	Kapuas	131.36	1,755.99	7.48%	148.61	1,837.12	8.09%
12.	Gunung Mas	66.06	990.64	6.67%	85.11	1,078.82	7.89%
13.	Lamandau	53.04	834.60	6.36%	95.06	906.31	10.49%
14.	Murung Raya	77.50	1,195.59	6.48%	111.03	1,303.99	8.51%

Sumber: Data olahan

**Tabel 4.5. Tingkat Kemandirian Keuangan Tahun di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Kemandirian Keuangan	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Palangkaraya	Rendah Sekali	Rendah Sekali
2.	Kotawaringin Timur	Rendah Sekali	Rendah Sekali
3.	Kotawaringin Barat	Rendah Sekali	Rendah Sekali
4.	Barito Timur	Rendah Sekali	Rendah Sekali
5.	Barito Utara	Rendah Sekali	Rendah Sekali
6.	Barito Selatan	Rendah Sekali	Rendah Sekali
7.	Seruyan	Rendah Sekali	Rendah Sekali
8.	Sukamara	Rendah Sekali	Rendah Sekali
9.	Pulang Pisau	Rendah Sekali	Rendah Sekali
10.	Katingan	Rendah Sekali	Rendah Sekali
11.	Kapuas	Rendah Sekali	Rendah Sekali
12.	Gunung Mas	Rendah Sekali	Rendah Sekali
13.	Lamandau	Rendah Sekali	Rendah Sekali
14.	Murung Raya	Rendah Sekali	Rendah Sekali

Sumber: Data olahan

“Tabel 4.4 dan tabel 4.5” menunjukkan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mandiri sepanjang tahun 2020-2021. Hal ini disebabkan karena tingginya pendapatan transfer daripada PAD dan pendapatan

transfer yang meningkat sepanjang tahun 2020-2021. Walaupun PAD juga meningkat tapi tidak dapat mengimbangi pendapatan transfer. Setiap daerah memiliki kemandirian keuangan yang rendah sekali sepanjang tahun 2020-2021.

**Tabel 4.6. Rasio Efektivitas PAD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021**

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Realisasi PAD	Anggar- an PAD	Rasio Efektivi- tas	Realisasi PAD	Anggara n PAD	Rasio Efektivi- tas
1.	Palangkaraya	180.18	173.01	104%	289.40	167.97	172%
2.	Kotawaringin Timur	232.89	270.00	86%	327.43	276.73	118%
3.	Kotawaringin Barat	224.65	255.06	88%	392.16	270.42	145%
4.	Barito Timur	61.66	88.44	70%	98.46	109.68	90%
5.	Barito Utara	75.96	121.27	63%	104.05	92.99	112%
6.	Barito Selatan	56.79	93.78	61%	97.74	95.78	102%
7.	Seruyan	70.36	266.92	26%	83.04	137.47	60%
8.	Sukamara	41.00	45.01	91%	55.78	42.40	132%
9.	Pulang Pisau	42.51	48.85	87%	125.32	46.39	270%
10.	Katingan	60.60	62.57	97%	67.04	80.00	84%
11.	Kapuas	131.36	128.78	102%	148.61	104.13	143%
12.	Gunung Mas	66.06	60.32	110%	85.11	64.02	133%
13.	Lamandau	53.04	50.72	105%	95.06	51.29	185%
14.	Murung Raya	77.50	70.93	109%	111.03	73.63	151%

Sumber: Data olahan

**Tabel 4.7. Tingkat Efektivitas PAD di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Efektivitas	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Palangkaraya	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2.	Kotawaringin Timur	Kurang Efektif	Sangat Efektif
3.	Kotawaringin Barat	Kurang Efektif	Sangat Efektif
4.	Barito Timur	Tidak Efektif	Cukup Efektif
5.	Barito Utara	Tidak Efektif	Sangat Efektif
6.	Barito Selatan	Tidak Efektif	Sangat Efektif
7.	Seruyan	Tidak Efektif	Kurang Efektif
8.	Sukamara	Cukup Efektif	Sangat Efektif
9.	Pulang Pisau	Kurang Efektif	Sangat Efektif
10.	Katingan	Cukup Efektif	Sangat Efektif
11.	Kapuas	Sangat Efektif	Sangat Efektif
12.	Gunung Mas	Sangat Efektif	Sangat Efektif
13.	Lamandau	Sangat Efektif	Sangat Efektif
14.	Murung Raya	Sangat Efektif	Sangat Efektif

*Sumber: Data olahan*

“Tabel 4.6 dan tabel 4.7” menunjukkan sepanjang tahun 2020-2021 efektivitas setiap daerah dalam memperoleh PAD meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya rasio efektivitas PAD yang melebihi 100% pada beberapa daerah sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh PAD dengan sangat efektif.

#### 4.2.2. Statistik Deskriptif

**Tabel 4.8. Hasil Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>			
	Mean	Std. Deviation	N
Kesejahteraan Masyarakat	70.6950	3.23328	28
Kemandirian Keuangan Daerah	9.8846	5.11451	28
Efektivitas PAD	108.1796	47.89796	28

Sumber: Hasil SPSS 25

“Tabel 4.8” menunjukkan bahwa *mean* variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 70.69% dengan standar deviasi 3.23%. Kesejahteraan masyarakat berkategori tinggi dengan angka rata-rata 70.69%.

*Mean* variabel kemandirian keuangan daerah adalah 9.88% dengan standar deviasi 5.11%. Kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kemandirian yang rendah sekali dengan angka rata-rata 8.33%.

*Mean* variabel efektivitas PAD adalah 108.18% dengan standar deviasi 47.90%. Kinerja di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan PAD sangat efektif berdasarkan angka rata-rata 108.18%.

### 4.2.3. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardize d Residual	
N		28	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.24480246	
Most Extreme Differences	Absolute	.147	
	Positive	.147	
	Negative	-.081	
Test Statistic		.147	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.127 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.539 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.526
		Upper Bound	.552

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil SPSS 25

“Tabel 4.9” menunjukkan bahwa nilai sig 0.539. Nilai sig 0.539 >

0.05. Hal ini memenuhi syarat agar data dapat dikatakan normal

#### 2. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.10. Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.720 <sup>a</sup>	.518	.479	2.33287	.939

a. Predictors: (Constant), Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil SPSS 25

“Tabel 4.10” menunjukkan  $1.5596 (dU) > 0.939 (durbin-watson) < 2.4404 (4 - dU)$ . Hal ini memenuhi kriteria agar tidak terdapat autokorelasi antar variabel.

### 3. Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinieritas**

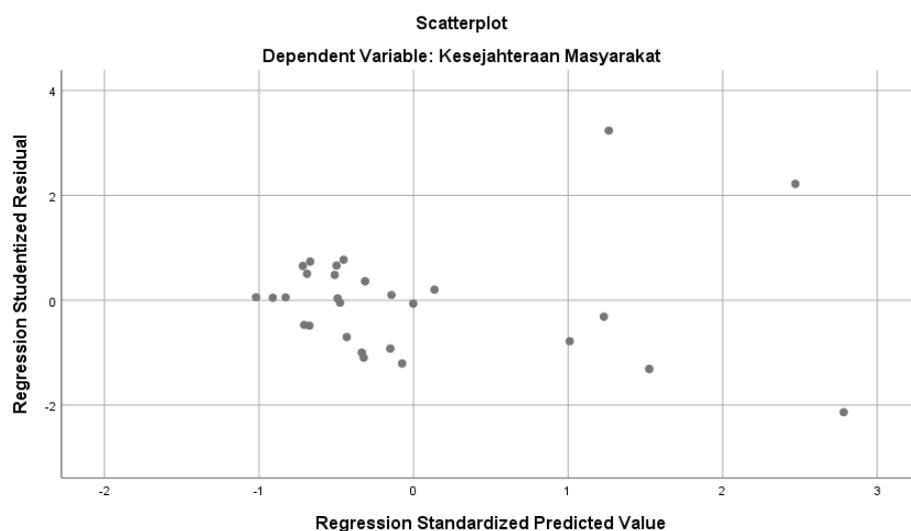
		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	66.813	1.210		55.234	.000		
	Kemandirian Keuangan Daerah	.481	.097	.761	4.986	.000	.827	1.209
	Efektivitas PAD	-.008	.010	-.120	-.785	.440	.827	1.209

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil SPSS 25

“Tabel 4.11” menunjukkan bahwa hasil VIF di antara 1 – 10, yaitu kemandirian keuangan daerah 1.209 dan efektivitas PAD 1.209. Hal ini menjelaskan tidak terdapat multikolinieritas.

### 4. Uji Heterokedasitas



**Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedasitas**

Hasil uji heterokedasitas menunjukkan titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola. Hal ini memenuhi kriteria regresi yang tidak terjadi heterokedasitas.

#### 4.2.4. Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.12. Hasil Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	66.813	1.210		55.234	.000			
	Kemandirian Keuangan Daerah	.481	.097	.761	4.986	.000	.827	1.209	
	Efektivitas PAD	-.008	.010	-.120	-.785	.440	.827	1.209	

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan analisis regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = 66.813 + 0.481X_1 + (-)0.008X_2$$

Persamaan di atas menggambarkan bahwa variabel bebas (*independent*)  $X_1$  dan  $X_2$  memengaruhi  $Y$ .  $X_1$  adalah kemandirian keuangan daerah,  $X_2$  adalah efektivitas PAD, dan  $Y$  adalah kesejahteraan masyarakat Interpretasi dari persamaan ini adalah sebagai berikut.

- Jika  $X_1$  dan  $X_2$  sama dengan nol maka kesejahteraan masyarakat nilainya adalah 66.813 satuan
- Jika  $X_1$  meningkat sebesar 1 sedangkan variabel lain tetap maka kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 0.481
- Jika  $X_2$  meningkat 1 sedangkan variabel lain tetap maka kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar -0.008

#### 4.2.5. Uji Determinasi

Tabel 4.13. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.720 <sup>a</sup>	.518	.479	2.33287	.939

a. Predictors: (Constant), Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil SPSS 25

“Tabel 4.13” menunjukkan *R Square* sebesar 0.518 yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat bisa diterangkan oleh variabel kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD sebesar 51.8% sedangkan sisanya dapat diterangkan dengan variabel yang lain.

#### 4.2.6. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.14. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146.204	2	73.102	13.432	.000 <sup>b</sup>
	Residual	136.057	25	5.442		
	Total	282.261	27			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Hasil SPSS 25

“Tabel 4.14” menunjukkan nilai sig  $0.000 < 0.05$  yang berarti kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### 4.2.7. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.15. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	66.813	1.210		55.234	.000		
	Kemandirian Keuangan Daerah	.481	.097	.761	4.986	.000	.827	1.209
	Efektivitas PAD	-.008	.010	-.120	-.785	.440	.827	1.209

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Hasil SPSS 25

“Tabel 4.15” menunjukkan nilai sig variabel kemandirian keuangan daerah lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000 yang berarti kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai sig variabel efektivitas PAD lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar “0.440”. hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan secara parsial (uji t), signifikansi rasio kemandirian keuangan daerah  $0.000 < \text{sig } \alpha$  ( $\alpha$ ) 0.05 yang berarti “rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat”. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020); Karimah et al., (2020).

Keberpengaruhannya tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin baik kemampuan daerah dalam menggali sumber asli keuangan daerah tanpa tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat sehingga hal yang telah diprogramkan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang dianggarkan. Walaupun rasio kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini rendah tapi rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan mandat yang telah diberikan masyarakat membuat program-program yang direfleksikan dalam anggaran. Dana diperlukan untuk melaksanakannya sehingga kemampuan menggali sumber asli keuangan daerah yang baik tanpa terlalu bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan pemerintah untuk menggali dan mengelola PAD tanpa terlalu mengandalkan dana transfer dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang semakin mandiri atau tidak terlalu mengandalkan pemerintah pusat akan lebih memiliki dana untuk melakukan pembangunan yang dapat diakses masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil kerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dalam APBD oleh pemerintah daerah. APBD penting perannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD mencerminkan kebijakan publik

dan program-program yang dibuat oleh politisi yang telah dipilih oleh masyarakat untuk memberikan manfaat kepada pemilihnya.

Penelitian ini mengikuti teori keagenan bahwa agen bertanggungjawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal. Pemerintah daerah yang telah dipilih (agen) oleh masyarakat (prinsipal) harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pertanggungjawaban yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kinerja atau prestasi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.3.2. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah**

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan secara parsial (uji t), signifikansi rasio efektivitas PAD  $0.440 > \text{sig } \alpha (a) 0.05$  yang berarti “rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh IPM yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat”. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020); Hamimah & Zulkarnain (2020).

Ketidakterpengaruh tersebut disebabkan karena PAD belum cukup untuk menutupi pos belanja operasi dan belanja modal. PAD sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer sehingga tidak mungkin untuk menutupinya. Selain itu, jumlah belanja operasi dan belanja modal lebih besar dari PAD walaupun secara rata-rata pemerintah daerah melampaui target PAD yaitu 108.18%.

Pemerintah daerah membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat yang dituangkan dalam APBD sehingga kesejahteraan dapat meningkat

namun pada penelitian ini rata-rata rasio efektivitas PAD melampaui target PAD belum bisa untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan untuk pelayanan publik. Efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan masyarakat sangat baik namun tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil kerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini didasarkan pada hasil kerja pemerintah daerah yang baik dalam melaksanakan APBD sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui keputusan politisi dalam APBD. Namun dalam penelitian ini, hasil kerja yang baik masih belum cukup untuk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Teori keagenan menjelaskan bahwa akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi hubungan agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat). Selain itu pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat menggali keuangan asli daerahnya namun hanya dari itu saja masih belum cukup untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil penelitian ini.

Peranan pemerintah pusat untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah sangat besar. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapatan transfer yang jauh lebih besar dibandingkan PAD. Sebagian besar dana yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat berasal dari pendapatan transfer. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamimah & Zulkarnain (2020) bahwa kesejahteraan

masyarakat akan meningkat meskipun rasio efektivitas PAD tidak mengalami perubahan karena sebagian besar dana berasal dari pendapatan transfer.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2021
2. Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

#### **5.2. Saran**

Saran yang disampaikan setelah memperoleh hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan asli daerah lebih baik lagi agar tidak terlalu bergantung kepada dana luar sehingga dapat mensejahterakan rakyat
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang lebih dapat menggambarkan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S., & Mispiyanti. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah*.
- Badan Pusat Statistik. (n.d). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022*. Retrieved May 10, 2023, from <https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur 2021*.
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3).
- Cahyaning, E., & Putri, F. K. (2022). Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.85>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Postur APBD*. Retrieved May 10, 2023, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10, 26–32.
- Evllyn, M., & Rahayu, Y. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*.
- Gani, I., & Amalia, S. (2014). *Alat Analisis Data : Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial* (M. Bendata, Ed.). CV. Andi Offset.
- Ghodang, H., & Hantono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Konsep Dasar dan Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur dengan SPSS)* (F. Ghodang, Ed.). Mitra Grup.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hamimah, H., & Zulkarnain, Z. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Riset Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- Kalteng.co. (2022, April 17). *Palangka Raya Raih Nilai Tertinggi IPM di Kalimantan*. Kalteng.Co.
- Karimah, N. N., Sarwani, & Adriani, A. (2020). Analysis of Regional Government Financial Performance and Impact on Welfare Society. *AKUNTABEL*.
- Khairudin, Aminah, & Redaputri, A. P. (2020). Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *AKUNTABEL*, 17(1), 148–151.  
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2, 357–370.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.4694>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru* (Mardiasmo, Ed.). CV. ANDI OFFSET.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336.  
<https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350>
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2020). *The Master Book of SPSS*. Anak Hebat Indonesia.
- Syamsi, I. (1986). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Rajawali.
- Todaro, M. P. (2010). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1990). *Human Development Report 1990*.
- Zakni, M. H. (2020, December). *Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. OMBUDSMAN.  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota		
	2020	2021	2022
Kalimantan Tengah	71,05	71,25	71,63
Kotawaringin Barat	72,87	73,07	73,41
Kotawaringin Timur	71,31	71,38	71,67
Kapuas	69,48	69,63	70,01
Barito Selatan	70,22	70,54	71,01
Barito Utara	70,59	70,79	71,21
Sukamara	68,03	68,27	68,94
Lamandau	70,51	70,58	71,11
Seruyan	67,58	67,67	68,24
Katingan	68,68	68,89	69,74
Pulang Pisau	68,45	68,53	69,01
Gunung Mas	70,81	71,03	71,40
Barito Timur	71,39	71,47	72,07
Murung Raya	67,98	68,12	68,63
Palangka Raya	80,77	80,82	81,16

### Lampiran 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

#### 1. Gunung Mas

##### Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN</b>							
<b>A</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosisl, Serta Budaya dan Olahraga</b>							
1	Pertumbuhan PDRB	(%)	7,04	7,09	7,15	7,20	7,26	7,30
2	Laju Inflasi	(%)	7,00	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
3	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	5.877.543,41	6.565.900,35	7.334.875,20	8.193.909,65	9.153.551,15	10.000.000,00
4	Angka Kemiskinan	(%)	5,36	5,14	4,93	4,73	4,54	4,25
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	1,13	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03
6	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	71,19	71,82	72,46	73,10	73,74	74,25
7	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	10.488,74	10.596,75	10.705,88	10.816,13	10.927,52	11.000,00

#### 2. Seruyan

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2019 (Baseline)	Target	
				2020	2021
<b>I.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,19	5,25	5,29
2	Laju inflasi	Persen	2,02	3,55	3,64
3	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	41,60	47,17	49,85
4	Indeks Gini	Poin	0,336	0,284	0,283
5	Persentase penduduk miskin	Persen	7,19	7,06	6,86
6	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jiwa	5.401	2.723	2.693
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,57	68,50	69,30
8	Angka Melek Huruf	Persen	98,87	98,92	98,93
9	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,70	8,47	8,73
10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,62	11,82	11,88
11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,83	70,31	70,55
12	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	71,66	79,04	81,21
13	Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,49	4,17	3,99
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persen	89,46	88,72	88,81
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	persen	70,07	78,04	81,04
16	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP
17	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	C	CC
18	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B
19	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	37,04	37,73	38,13
20	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	6,48	6,61	6,75
21	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	32,56	32,87	33,18
22	Pertumbuhan Industri Rumah Tangga	Persen	2,57	2,58	2,87
23	Persentase Koperasi Aktif	Persen	86,81	82,56	82,93
24	Persentase UMKM yang berdaya saing	Persen	0,39	2,94	3,94
25	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap.	Persen	17,98	18,32	23,82
26	Rasio elektrifikasi	Persen	49,78	48,05	48,53
27	Rasio rumah layak huni	Persen	48,17	48,90	49,63
28	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Segintung	Persen	5	5	5
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54,98	75,40	77,40
30	Skor pola pangan harapan	Poin	79,60	93,50	94,50
31	Jumlah kunjungan wisata	Kunjungan	29.922	50.505	60.505

RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2021

VI-3

### 3. Lamandau

PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2018-2023

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023**

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	RPJMD Tahun 2018-2023						Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023				
		Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target		Kondisi Akhir	Target			Kondisi Akhir	
			2019	2020	2021	2022		2023	2021	2022		2023
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>												
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (predikat)	NA	C	C			BB	BB	CC	B	BB	BB
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,59	5,81	-3,25			6,96	6,96	4,29	5,01	6,03	6,03
3.	Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65	95	91			35	35	90	88	86	86
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	67,91	68,55	68,68			70,75	70,75	68,72	68,90	69,00	69,00
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	85,70	85,57	85,56			86,03	86,03	85,72	85,81	86,03	86,03
6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,32	66,57	66,41			65,19	65,19	67,09	67,16	67,22	67,22
7.	Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%)	69	69	77			92,3	92,3	85	85	85	85
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75	76,17	74,67			76,85	76,85	75,55	76,73	76,85	76,85
9.	Jumlah kasus konflik SARA (kasus)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>INDIKATOR SASARAN</b>												
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (predikat)	NA	C	C	B	BB	BB	BB	CC	B	BB	BB
2.	Nilai SAKIP (predikat)	CC	CC	CC	BB	BB	A	A	B	BB	A	A

### 4. Kapuas

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS 2022

**Tabel 6.1.3**  
**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target RPJMD			OPD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	
<b>1</b>	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1.1	Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi				
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.1.1.1	Pertumbuhan PDR	8,21	8,4	8,6	
1.1.1.2	Laju Inflasi (%)	2,37	2,19	2	
1.1.1.3	PDRB per Kapita (juta)	46,11	48,05	50	
1.1.1.4	Angka Kemiskinan (%)	4,23	3,86	3,5	
1.1.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,81	3,4	3	
1.1.1.6	Indeks Gini	0,2867	0,2808	0,28	
1.1.1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,26	74,1	75	
1.1.1.8	Skor penyelenggaraan pemerintahan daerah	2,979	2,9865	3,0674	Sekretariat Daerah
1.2	Kesejahteraan Sosial				
1.2.1	Pendidikan				
1.2.1.1	Angka Melek Huruf (%)	99,3	99,4	99,5	Dinas Pendidikan
1.2.1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (%)	8,42	8,74	9	Dinas Pendidikan
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,61	13,95	14,29	Dinas Pendidikan
1.2.1.4	Angka partisipasi kasar (%)	93	93,5	94	Dinas Pendidikan
1.2.1.5	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.2.1.6	Angka Partisipasi Murni (%)	83,5	83,75	84	Dinas Pendidikan
1.2.1.7	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (%)	96,50	97,00	97,50	Dinas Pendidikan
1.2.1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	71,90	72,50	73,00	Dinas Pendidikan
1.2.2	Kesehatan				
1.2.2.1	Angka (Umur) Harapan Hidup	71,04	71,83	72,5	Dinas Kesehatan
1.2.2.2	Angka Kematian Ibu	28/100.000 KH	12/100.000 KH	6/100.000 KH	Dinas Kesehatan
1.2.2.3	Angka Kematian Bayi	3/1000KH	2/1000KH	1/1000KH	Dinas Kesehatan
1.2.2.4	Prevalensi Gizi Buruk	0,01%	0,01%	0,01%	Dinas Kesehatan
1.2.2.5	Angka Kematian Balita	3/1000KH	2/1000KH	1/1000KH	Dinas Kesehatan
1.2.3	Ketenagakerjaan				
1.2.3.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,20	69,60	70,0	Dinas Tenaga Kerja
1.2.3.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,61	3,4	3,0	Dinas Tenaga Kerja
1.3	Seni Budaya dan Olahraga				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022

IV - 6

## 5. Kalimantan Tengah

**Tabel 5.1**  
Target dan Capaian IPM  
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
1	Kotawaringin Barat	70,60	71,13	72,11	72,46	72,48	72,93
2	Kotawaringin Timur	68,61	69,42	70,17	70,56	69,56	69,76
3	Kapuas	66,07	66,98	68,04	68,68	70,19	71,72
4	Barito Selatan	68,27	69,00	69,25	69,73	-	-
5	Barito Utara	67,38	68,28	69,07	69,72	71,22	71,86
6	Sukamara	65,80	66,40	66,98	67,52	68,00	69,00
7	Lamandau	68,30	68,54	69,17	69,70	69,97	70,77
8	Seruyan	64,77	65,40	66,14	67,04	67,70	68,50
9	Katingan	66,81	67,41	67,56	67,91	68,61	69,14
10	Pulang Pisau	65,76	66,49	67,00	67,54	67,84	68,71
11	Gunung Mas	69,24	69,73	69,95	70,23	75,25	75,25

### BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

V-2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020



### Lampiran 3. Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD)

#### 1. Palangkaraya



#### Perubahan RPJMD Kota Palangkaraya Tahun 2018-2023

**Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangkaraya Tahun 2018-2023**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,20
2	PDRBper Kapita(ADHK)	10.154.1 19.2	10.881. 804.9	11.592. 620,0	12.360. 214,8	13.162. 975,6	14.000. 902,4	14.000.902 ,4
3	PDRBper Kapita(ADHB)	58,17	63,81	69,92	76,42	83,31	90,59	90,59
4	Laju inflasi	4,00	3,90	3,85	3,80	3,7	3,65	3,65
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,00	5,78	5,84	5,84	5,78	5,72	5,72
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,47%	3,45%	3,43%	3,40%	3,38%	3,35%	3,35%
7	Jumlah Penduduk Miskin	9,78	9,69	9,69	9,72	9,69	9,66	9,66
9	Indeks Pembangunan Manusia	79,70	79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,20
10	Angka Harapan Hidup	73,13	73,20	73,15	73,17	73,19	73,19	73,19
11	Harapan Lama Sekolah	11,03	11,04	11,05	11,06	11,07	11,10	11,10
12	Rata-Rata Lama Sekolah				11,80	11,84	11,85	11,85
13	Pengeluaran Per kapita	13.677	14.091	14.085	15.538	15.584	16.178	16.178
14	Indeks Gini	0,330	0,327	0,325	0,322	0,320	0,318	0,318
15	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,10	90,20	90,20	91,80	93,40	93,40

#### 2. Kotawaringin Timur

Tabel 8.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian		Target			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	68,61	69,42	70,17	69,34	69,56	69,76	69,94
2	Rasio konektivitas jalan darat antar pusat kegiatan	rasio	NA	NA	92,00	92,00	96,00	100,00	100,00
3	Inflasi	persen	5,72	2,46	3,29	5 - 7	5 - 7	5 - 7	5 - 7
4	PDRB per Kapita	juta rupiah	32,45	34,24	36,15	37,57	39,12	41,07	42 - 44
5	Tingkat Kemiskinan	persen	6,42	6,32	6,24	5,91	5,51	5,32	4 - 5
6	Tingkat Pengangguran	persen	3,53	NA	4,92	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
7	Indeks Gini	indeks	0,28	0,32	0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	NA	NA	NA	71,47	72,15	73,14	73,75
9	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	indeks	NA	NA	NA	C	CC	B	A
10	Pertumbuhan Ekonomi	persen	7,62	7,93	7,99	7,82	7,88	7,95	8,11

### 3. Kotawaringin Barat

**Tabel 8. 1: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Kotawaringin Barat  
Tahun 2017 – 2022**

	Indikator	Satuan	Target tahun ke					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Good Governance	Skala	NA	6,04	6,14	6,2	6,24	6,28
2	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,58	72,03	72,48	72,93	73,38	73,83
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	NA	7,48	7,53	7,58	7,63	7,68
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skala	NA	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00
5	Indeks Pembangunan Masyarakat	skala	NA	6,12	6,2	6,4	6,8	7,1
6	Angka Kemiskinan	%	NA	4,50	4,30	4,10	3,90	3,50
7	Tourism Intencity Index	NA	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat

### 4. Barito Timur

**Tabel 8.1.  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023**

INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
		2019	2020	2021	2022	2023	
LPE	5,98	6,49	6,74	6,99	7,25	7,5	7,5
IPM	70,57	71,59	72,065	72,53	73	73,5	73,5
IPG	88,16	89,8	90,21	90,62	91,03	91,5	91,5
Indeks Gini	0,307	0,296	0,291	0,286	0,28	0,275	0,275
Angka Kriminalitas	0,16	0,15	0,1	0,1	0	0	0
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	76	78	80	82	84	85
IKLH	NA	61,02	63,15	65,08	65,87	66,65	66,65
LPE Sektor Pertanian	6,54	7,03	7,27	7,51	7,76	8,00	8,00
LPE sektor Industri Pengolahan	7,84	8,56	8,92	9,28	9,64	10,00	10,00
PDRB Sektor pariwisata	NA	4,2	4,7	5,3	5,8	6,3	7,32
Jumlah kunjungan wisatawan	10.969	11.479	11.735	11.990	12.245	12.500	12.500
Pengeluaran perkapita	1.083.989	1.222.659	1.291.995	1.361.330	1.430.665	1.500.000	1.500.000
Nilai	12.000	250	300	350	400	500	13.800

## 5. Barito Utara

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023

**Tabel V.4**  
**Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah**  
**Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023**

**Visi: "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah.	Persentase desa/keurahan yang terhubung dengan pusat kota			%	66,99	67,96	67,96	81,55	81,55	87,38	92,23
				Meningkatnya desa/keurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/keurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	84,47	84,47	84,47	85,44	92,23	92,23
				Meningkatnya desa/keurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/keurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	49,51	60,19	66,99	74,76	81,55	88,35	95,15
				Menurunnya desa/keurahan blankpot	Persentase desa/keurahan blankpot	%	88,35	66,02	46,60	27,18	17,48	7,77	0,00
2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia			Nilai	69,07	69,70	70,37	71,02	71,65	72,30	73,04
				Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	tahun	8,38	8,57	8,60	8,70	8,80	8,90	9,00
					2. Angka Melek Huruf	%	97,01	98,14	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	1. Angka Harapan Hidup	tahun	71,27	71,27	71,28	71,29	71,30	71,31	71,32
					2. Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	256	256	256	256	213	213	213
					3. Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	3	3	3	3	3	2	2
Meningkatnya daya beli masyarakat	Penghaaran perkapita pertahun	Juta Rupiah	9.067	9.179	9.324	9.478	9.643	9.825	10.027				

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-17

## 6. Barito Selatan

**Tabel 8.2**

**Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1	Pertumbuhan PDRB	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8	7,8
2	Laju Inflasi	4,55	4,4	4,25	4,15	4,05	3,85
3	PDRB per kapita	25,2	27,3	29,4	31,5	33,1	35,2
4	Indeks Gini	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,04	69,73	70,43	71,33	72,22	73,1
6	Angka Melek Huruf	98,9	98,9	98,9	99	99,5	99,5
7	Angka rata-rata lama sekolah	12	12	12	12	12	12
8	Angka usia harapan hidup	71,56	71,68	71,8	71,92	72,04	72,5
9	Angka partisipasi angkatan kerja	68.276	69.642	71.034	72.455	73.904	75.382
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	150,00	165	182	200	220	242
11	Tingkat pengangguran terbuka	5,28	5,06	4,84	4,62	4,40	4,65
12	Rasio penduduk yang bekerja	86,57	88,87	92,45	93,47	94,78	96,57
13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	5.635	5.485	5.285	5.135	4.850	4.650

## 7. Sukamara



**Tabel 8.2.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>								
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	6,17	5,9	5,9	5,9	6	6,1	5,28
2	Tingkat Inflasi	6,02%	2,02%	1,62%	4%	4%	4%	4%
3	Indeks Pembangunan Manusia	67,52	67,95	68,03	68,62	69,21	69,81	69,81
4	Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun)	97,64%	97,62%	97,70%	97,80%	98,00%	98,15%	98,15%
5	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,10	12,11	12,12	12,29	12,75	12,95	12,77
6	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,84	7,91	8,01	8,15	8,49	8,64	8,48
7	Angka Harapan Hidup (tahun)	71,45	71,49	71,53	71,55	71,58	71,6	71,6
8	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,83	3,57	3,13	2,72	2,33	1,98	1,98
9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,18	73,37	65,60	65,71	65,83	65,94	65,94
10	Angka Kemiskinan	3,19	3,36	3,36	3,36	3,2	3,2	2,79
11	PDRB Per Kapita ADHB (Juta rupiah/tahun)	62,47	65,18	66,27	70,27	74,52	79,02	79,02
12	Indek Kepuasan Masyarakat	82,00%	89,3	90	90	95	95	95
13	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	1.189.064,7	1.274.424,1	1.417.944,9	1.436.270,6	1.513.308,7	1.590.346,7	1.590.346,7
15	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	112	126	132	137	144	152	152
16	Kontribusi sektor Pariwisata dalam PDRB	47	52	52	55	59	62	62
17	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14
18	Nilai Realisasi Investasi	Rp3.930.121.324.307,00	1,06078E+11	1,08199E+11	Rp647.917.255.507	Rp680.313.188.283	Rp714.328.774.198	Rp5.972.680.542.295,00
19	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,2	86,8	89,5	92,1	94,7	100	100

## 8. Katingan

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023**

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	RPJMD Tahun 2018-2023						Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023				
		Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target		Kondisi Akhir	Target			Kondisi Akhir	
			2019	2020	2021	2022		2023	2021	2022		2023
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>												
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (predikat)	NA	C	C			BB	BB	CC	B	BB	BB
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,59	5,81	-3,25			6,96	6,96	4,29	5,01	6,03	6,03
3.	Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65	95	91			35	35	90	88	86	86
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	67,91	68,55	68,68			70,75	70,75	68,72	68,90	69,00	69,00
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	85,70	85,57	85,56			86,03	86,03	85,72	85,81	86,03	86,03
6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,32	66,57	66,41			65,19	65,19	67,09	67,16	67,22	67,22
7.	Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%)	69	69	77			92,3	92,3	85	85	85	85
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75	76,17	74,67			76,85	76,85	75,55	76,73	76,85	76,85
9.	Jumlah kasus konflik SARA (kasus)	0	0	0			0	0	0	0	0	0

## 9. Murung Raya



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

### terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>							
<b>I Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,38	6,66	6,94	7,22	7,50
1.2	Tingkat inflasi (Palangkaraya)	%	2,99	2,93	2,87	2,81	2,75
1.3a	PDRB ADHB	Juta Rp	7.813.296,20	8.331.648,00	8.849.999,80	9.368.351,60	9.886.703,40
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	64,65	67,47	70,17	72,77	75,26
1.4	Indeks gini	%	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28
1.5	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	94,75	95,06	95,37	95,69	96,00
1.6	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7	Tingkat pengangguran	%	2,52	2,39	2,26	2,13	2,00
1.8	Paritas daya beli	Ribu Rp	10.182,20	10.355,00	10.527,80	10.700,60	10.873,40
1.9	Jumlah Penduduk	Jiwa	120.863	123.489	126.115	128.741	131.367
1.10.a	Pertumbuhan Penduduk	%	2,22	2,17	2,13	2,08	2,04
1.10.b	Pengeluaran per kapita	Rp.	1.240.725,33	1.305.544,00	1.370.362,67	1.435.181,33	1.500.000,00
1.11	IPM		68,11	68,58	69,05	69,53	70,00

**Lampiran 4. Peringkat IPM Provinsi Tahun 2020-2021**

No.	Provinsi	2020	No.	Provinsi	2021
1.	DKI Jakarta	80.77	1.	DKI Jakarta	81.11
2.	DI Yogyakarta	79.97	2.	DI Yogyakarta	80.22
3.	Kalimantan Timur	76.24	3.	Kalimantan Timur	76.88
4.	Kepulauan Riau	75.59	4.	Kepulauan Riau	75.79
5.	Bali	75.5	5.	Bali	75.69
6.	Sulawesi Utara	72.93	6.	Sulawesi Utara	73.3
7.	Riau	72.71	7.	Riau	72.94
8.	Banten	72.45	8.	Banten	72.72
9.	Sumatera Barat	72.38	9.	Sumatera Barat	72.65
10.	Jawa Barat	72.09	10.	Jawa Barat	72.45
11.	Aceh	71.99	11.	Sulawesi Selatan	72.24
12.	Sulawesi Selatan	71.93	12.	Aceh	72.18
13.	Jawa Tengah	71.87	13.	Jawa Tengah	72.16
14.	Sumatera Utara	71.77	14.	Jawa Timur	72.14
15.	Jawa Timur	71.71	15.	Sumatera Utara	72.00
16.	Kepulauan Bangka Belitung	71.47	16.	Kepulauan Bangka Belitung	71.69
17.	Sulawesi Tenggara	71.45	17.	Sulawesi Tenggara	71.66
18.	Bengkulu	71.4	18.	Bengkulu	71.64
19.	Jambi	71.29	19.	Jambi	71.63
20.	Kalimantan Tengah	71.05	20.	Kalimantan Selatan	71.28
21.	Kalimantan Selatan	70.91	21.	Kalimantan Tengah	71.25
22.	Kalimantan Utara	70.63	22.	Kalimantan Utara	71.19
23.	Sumatera Selatan	70.01	23.	Sumatera Selatan	70.24
24.	Lampung	69.69	24.	Lampung	69.90
25.	Sulawesi Tengah	69.55	25.	Sulawesi Tengah	69.79
26.	Maluku	69.49	26.	Maluku	69.71
27.	Gorontalo	68.68	27.	Gorontalo	69.00
28.	Maluku Utara	68.49	28.	Maluku Utara	68.76
29.	Nusa Tenggara Barat	68.25	29.	Nusa Tenggara Barat	68.65
30.	Kalimantan Barat	67.66	30.	Kalimantan Barat	67.90
31.	Sulawesi Barat	66.11	31.	Sulawesi Barat	66.36
32.	Nusa Tenggara Timur	65.19	32.	Nusa Tenggara Timur	65.28
33.	Papua Barat	65.09	33.	Papua Barat	65.26
34.	Papua	60.44	34.	Papua	60.62